



P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

JOURNAL MARINE INSIDE

VOLUME 7, ISSUE 1, JUNE 2025

Web: <https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

Evaluasi proses kepabeanaan ekspor: Studi pengaruh kebijakan INSW terhadap efisiensi dan transparansi

Boedi Prihandono, Arief Hidayat Tumanggor*, Asnawi, Susiarni Magdalena, Muhammad Dhika Rizqi Fadhillah, Dzaki Muzhaffar Faiq, Rif'at Zulian Aisyah
Politeknik Pelayaran Banten

E-mail: *ariefhidayattumanggor.medan1985@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) terhadap efisiensi dan transparansi proses kepabeanaan ekspor di Indonesia. Menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*), studi ini mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data waktu *clearance* dan biaya administrasi, serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi INSW mampu menurunkan rata-rata waktu penyelesaian kepabeanaan dari 48 jam menjadi 36 jam, serta mengurangi biaya administrasi hingga 28%. Selain itu, peningkatan transparansi tercermin dari skor kepuasan pengguna terhadap akses informasi yang mencapai rata-rata 4,2 dari 5, meskipun masih terdapat kendala dalam kejelasan prosedur. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kesiapan infrastruktur digital dan rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital, dan penyederhanaan prosedur sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan INSW secara berkelanjutan.

Kata Kunci: INSW, kepabeanaan ekspor, efisiensi logistik, transparansi, literasi digital.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Indonesia National Single Window (INSW) policy on the efficiency and transparency of export customs processes in Indonesia. Utilizing a *mixed-method* approach, the research combines quantitative analysis of clearance time and administrative costs with qualitative insights gathered through interviews with business actors and relevant authorities. The findings reveal that the implementation of INSW successfully reduced the average customs clearance time from 48 hours to 36 hours and lowered administrative costs by up to 28%. Additionally, the system enhanced information accessibility, reflected in an average user satisfaction score of 4.2 out of 5, although some issues remain regarding procedural clarity. The main challenges identified include limited digital infrastructure readiness and low user understanding of the system. Accordingly, this study recommends strengthening technological infrastructure, improving digital literacy, and simplifying procedures to optimize the long-term implementation of the INSW policy.

Keywords: INSW, export customs, logistics efficiency, information transparency, port digitalization.



Journal Marine Inside is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tersedia pada: <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i1.125>

Disubmit pada 25/04/2025	Direview pada 30/04/2025	Direvisi pada 05/05/2025
Diterima pada 31/05/2025	Diterbitkan pada 01/06/2025	

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan internasional yang semakin ketat, efisiensi dalam proses kepabeanan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Sebagai negara dengan potensi ekspor yang besar, Indonesia mencatat nilai ekspor sebesar USD 232,6 miliar pada tahun 2022, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif di sektor perdagangan internasional [1]. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, khususnya dalam hal prosedur kepabeanan ekspor yang kompleks, waktu clearance yang panjang, dan biaya administrasi yang tinggi [2].

Salah satu kendala utama adalah lamanya waktu dwelling time di pelabuhan yang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara [3]. Kondisi ini tidak hanya menambah beban biaya logistik bagi eksportir, tetapi juga menurunkan daya saing produk nasional di pasar global. Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Indonesia National Single Window (INSW), sebuah sistem yang bertujuan mengintegrasikan berbagai proses dan dokumen kepabeanan ke dalam satu platform digital. INSW diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, memperbaiki transparansi, dan meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam ekspor-impor.

Namun, pelaksanaan kebijakan INSW masih menghadapi sejumlah hambatan. Rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini secara optimal [4]. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu masih dominan menggunakan pendekatan kualitatif dan belum banyak yang mengkaji dampak implementasi INSW secara kuantitatif, khususnya dalam konteks pengaruhnya terhadap efisiensi waktu dan biaya [5]. Kesenjangan ini memperkuat urgensi perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi administrasi publik telah terbukti mampu mendorong efisiensi dan akuntabilitas di berbagai negara, baik maju maupun berkembang [6]. Namun, pengaruh digitalisasi dalam konteks kepabeanan ekspor Indonesia, khususnya yang terintegrasi melalui kebijakan INSW, masih kurang mendapatkan sorotan ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan INSW dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepabeanan ekspor di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini tidak hanya mengukur pengaruh kebijakan terhadap waktu dan biaya clearance, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan persepsi dari pelaku usaha dan otoritas terkait.

Kontribusi utama dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan dalam literatur akademik mengenai kebijakan digital kepabeanan, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan

yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis data. Dengan demikian, sistem kepabeanaan Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) terhadap efisiensi dan transparansi proses kepabeanaan ekspor di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang terukur dan objektif, serta menganalisis hubungan antar variabel melalui teknik statistik yang tepat, seperti regresi linier.

Desain kuantitatif dalam penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran pengaruh antar variabel, khususnya pengaruh kebijakan INSW terhadap indikator efisiensi (seperti waktu clearance dan biaya administrasi) dan transparansi (seperti akses informasi dan persepsi pengguna). Meskipun penelitian ini bersifat kuantitatif, pertimbangan terhadap konteks lapangan juga diberikan melalui pemahaman atas kondisi infrastruktur digital dan kesiapan pelaku usaha, yang menjadi variabel-variabel kontekstual yang relevan dalam interpretasi hasil.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terbatas dan klarifikasi teknis dengan narasumber ahli, yakni Bapak Haposan Indra Wesly Pasaribu, SST, ME, MIDS dan Bapak Ahmad Yosep Setiaji S, MN yang merupakan pejabat di Bidang Bimbingan Kepabeanaan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Priok. Wawancara dilakukan dalam rangkaian Company Visit ke Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, khususnya kepada petugas bagian Border Checking, guna memperoleh informasi lapangan yang valid dan relevan terkait implementasi kebijakan INSW. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan, publikasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data statistik yang berkaitan dengan durasi waktu clearance dan biaya administrasi ekspor sebelum dan sesudah penerapan INSW.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara umum, seperti rata-rata waktu penyelesaian dan tingkat kepuasan pengguna. Sementara itu, analisis inferensial, khususnya regresi linier, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (implementasi kebijakan INSW) terhadap variabel dependen (efisiensi dan transparansi proses kepabeanaan ekspor). Penggunaan teknik regresi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel, serta mengukur sejauh mana kebijakan INSW memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan performa layanan kepabeanaan. Dengan kombinasi teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan berbasis data terhadap efektivitas kebijakan INSW dalam mendorong reformasi layanan kepabeanaan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Waktu Clearance

Salah satu indikator utama untuk mengukur efisiensi proses kepabeanan ekspor adalah durasi waktu clearance di pelabuhan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat penurunan signifikan pada rata-rata waktu clearance setelah implementasi kebijakan Indonesia National Single Window (INSW):

Tabel 1. Rata-rata waktu clearance sebelum dan setelah implementasi INSW.

Periode	Rata-rata Waktu Clearance (Jam)
Sebelum Implementasi INSW	48
Setelah Implementasi INSW	36

Penurunan waktu clearance sebesar 12 jam menunjukkan perbaikan efisiensi yang substansial. Integrasi sistem digital yang dilakukan melalui INSW telah berhasil menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat alur dokumen. Hasil ini mendukung teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Williamson [7], yang menyatakan bahwa efisiensi organisasi dapat dicapai melalui pengurangan waktu dan biaya administratif.

Temuan ini juga sejalan dengan studi oleh Nurkhamid & Rahayu [8], yang menunjukkan bahwa digitalisasi logistik seperti Pusat Logistik Berikat (PLB) berdampak nyata dalam menekan biaya dan waktu pengurusan ekspor. Namun, perbedaan muncul dibandingkan dengan pendapat Nugroho [9], yang mengasumsikan bahwa digitalisasi secara otomatis akan meningkatkan efisiensi tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil studi ini justru menemukan bahwa kesiapan infrastruktur digital tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi.

Transparansi dan Akses Informasi

Indikator transparansi dalam penelitian ini diukur melalui tingkat kepuasan pengguna terhadap akses informasi yang disediakan oleh sistem INSW. Hasil survei menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat kepuasan terhadap akses informasi kepabeanan.

Kriteria Akses Informasi	Skor Kepuasan (Skala 1–5)
Aksesibilitas informasi melalui sistem INSW	4,2
Kejelasan prosedur dan persyaratan kepabeanan	3,8
Waktu memperoleh informasi	4,1

Mayoritas responden memberikan skor tinggi terhadap aksesibilitas informasi (4,2), yang menunjukkan bahwa sistem INSW memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses kepabeanan. Hasil ini mendukung teori transparansi yang dikemukakan oleh Hood [10], di mana akses informasi yang terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi.

Meski demikian, skor yang lebih rendah pada aspek kejelasan prosedur (3,8) menunjukkan masih adanya hambatan dalam pemahaman teknis di kalangan pelaku usaha. Hal

ini konsisten dengan temuan Supriatin & Aulia [4] yang mencatat bahwa rendahnya literasi digital dan ketidakjelasan petunjuk teknis masih menjadi persoalan dalam penerapan sistem digital di sektor kepabeanan.

Efisiensi Biaya Administrasi dan Pengurusan Dokumen

Selain waktu, aspek biaya juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai efisiensi implementasi INSW. Data yang dikumpulkan memperlihatkan adanya pengurangan biaya yang signifikan setelah kebijakan ini diberlakukan:

Tabel 3. Biaya kepabeanan sebelum dan setelah implementasi INSW.

Jenis Biaya	Sebelum INSW (IDR)	Setelah INSW (IDR)
Biaya administrasi kepabeanan	10,000,000	7,500,000
Biaya Pengurusan Dokumen dan Izin	5,000,000	3,200,000
Total biaya kepabeanan	15,000,000	10,700,000

Penurunan total biaya sebesar 28% mengindikasikan bahwa integrasi sistem digital melalui INSW telah berhasil menekan pengeluaran administratif pelaku usaha. Hal ini memperkuat temuan Rinaldi, dkk [11] yang menekankan bahwa kebijakan berbasis digitalisasi mampu mengurangi biaya logistik nasional secara signifikan.

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Sistem INSW

Aspek kepercayaan publik menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik. Survei dalam penelitian ini mengukur persepsi responden terhadap transparansi dan efisiensi sistem INSW:

Tabel 4. Tingkat kepercayaan publik terhadap INSW.

Kategori	Skor Kepercayaan (Skala 1–5)
Kepercayaan terhadap sistem INSW	4,3
Kepercayaan terhadap transparansi	4,0
Kepercayaan terhadap efisiensi layanan	4,1

Rata-rata skor kepercayaan yang tinggi, terutama terhadap sistem INSW (4,3), mencerminkan persepsi positif dari pelaku usaha terhadap efektivitas sistem dalam meningkatkan kualitas layanan. Hal ini mendukung pandangan Alamsyah [6] yang menegaskan bahwa digitalisasi dan keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan publik.

Sintesis Temuan

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan INSW memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi proses kepabeanan ekspor di Indonesia. Efisiensi terlihat dari penurunan waktu clearance dan biaya administrasi, sementara transparansi tercermin dari tingginya kepuasan atas akses informasi. Temuan ini mendukung teori biaya transaksi [7] dan menegaskan pentingnya digitalisasi dalam reformasi birokrasi. Meski demikian, masih diperlukan perbaikan dalam kejelasan prosedur dan kesiapan

infrastruktur, yang menandakan bahwa keberhasilan digitalisasi juga bergantung pada kesiapan institusi dan sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Implementasi *Indonesia National Single Window* (INSW) terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepabeanaan ekspor di Indonesia. Waktu clearance berkurang dari 48 menjadi 36 jam, sementara total biaya kepabeanaan menurun sebesar 28%. Sistem ini juga meningkatkan akses informasi dan kepercayaan pengguna, dengan skor kepuasan masing-masing sebesar 4,2 dan 4,3. Temuan ini mendukung teori biaya transaksi dan transparansi, serta menunjukkan bahwa integrasi digital dapat memperkuat daya saing ekspor. Namun, tantangan terkait infrastruktur dan pemahaman teknis masih perlu diatasi melalui penguatan kapasitas digital dan penyederhanaan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Parashakti, R. D., & Astuti, S. (2023). *Tren Ekspor Indonesia dalam Lanskap Ekonomi Global 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- [2] Leo, Y. (2023). Efektivitas sistem kepabeanaan dan tantangan globalisasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 33–47.
- [3] Verawati, R., Susanto, D., & Halim, A. (2022). Perbandingan waktu dwelling time indonesia dan negara tetangga: Implikasi terhadap daya saing ekspor. *Jurnal Logistik Nasional*, vol. 5, no. 2, pp. 89–101.
- [4] Supriatin, R., & Aulia, M. (2022). Kesiapan infrastruktur dan literasi digital dalam implementasi INSW. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, vol. 3, pp. 55–67.
- [5] Perdana, R. (2020). Analisis kualitatif proses kepabeanaan di indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 17, no. 2, pp. 113–128.
- [6] Alamsyah, R. (2023). *Digitalisasi Administrasi Publik dan Efisiensi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- [7] Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. *American Journal of Sociology*, vol. 87, no. 3, pp. 548–577. <https://doi.org/10.1086/227496>.
- [8] Nurkhamid, M., & Rahayu, S. T. (2020). Efisiensi biaya logistik dengan fasilitas kepabeanaan pusat logistik berikat: Impian atau kenyataan?. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, vol. 4, no. 1, pp. 36-50. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.763>.
- [9] Nugroho, A. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi layanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, vol. 7, no. 2, pp. 213–236. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163>.
- [10] Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. *Public Administration*, vol. 80, no. 4, pp. 693–710.
- [11] Rinaldi, D. T., Rahmatunnisa, M., & Chan, A. (2022). Evaluasi kebijakan Mitra Utama Kepabeanaan dengan metode Context, Input, Process, Product. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 1, pp. 1–17.